



TRADISI NYADRAN: Sejumlah warga membawa keranjang anyaman bambu berisi bermacam makanan saat tradisi Nyadran Suroloyo Sepujud di Soropadan, Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah, Jumat (1/3/2024). Tradisi Nyadran rutin dilaksanakan masyarakat setempat setiap Jumat Pahing bulan Sya'ban untuk menyambut Ramadan sekaligus mendoakan arwah leluhur.

Ada

"Ini sebenarnya bisa dimasukkan ke DPK LN karena ia tidak punya form A pindah memilih karena DPK LN itu data memilih yang menggunakan KTP-el atau paspor yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara," katanya.

Selain itu, Lolly mengatakan, terdapat kejadian khusus lainnya yang melibatkan PPLN Islamabad. Ia mengungkapkan,

PPLN dan kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri (KPPSLN) tidak memberikan tanda pengenal saksi.

"Sudah diberikan saran perbaikan untuk segera sehari sebelum hari-H dilakukan pemberian tanda pengenal terhadap saksi, tetapi tidak juga ditindaklanjuti PPLN," ujarnya.

Adapun DPT di Islamabad berjumlah

817 pemilih. Sementara itu, yang menggunakan hak pilih 586 orang dengan perincian 505 DPT, 69 DPTb dan 13 DPK. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan 38 suara, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 141 suara dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud memperoleh 47 suara. (Ant)-d

Setoran

Setelah diidentifikasi, Jaksa mengatakan beberapa transaksi setoran tunai dengan nilai fantastis tersebut telah terungkap identitas pengirimnya, yakni terkait penerimaan dari Johannes Komarudin, Yanto Anda Sucipto, PT Marinten dan PT Yuris Maju Bersama, Rudi Hartono, serta penukaran valas Taufik Hidayat. Kendati demikian terdapat setoran tunai senilai Rp 20 miliar ke

delapan rekening tersebut yang tidak ada identitas pengirimnya.

Menanggapi hal itu, Andhi mengaku sudah tidak ingat dengan berbagai transaksi tersebut lantaran jumlahnya yang banyak dan sudah cukup lama. "Tetapi kalau setoran tunai ke rekening yang saya pakai mungkin itu merupakan perputaran uang dalam melakukan hasil usaha dengan Pak Salem,"

ucapnya.

Adapun terkait banyaknya transaksi mencurigakan dalam rekeningnya, Andhi mengklaim beberapa transaksi tersebut merupakan transaksi bisnis dengan pihak swasta bernama Sia Leng Salem, di luar perannya sebagai pejabat pemerintahan. Andhi mengaku berinvestasi pada perusahaan Sia Leng Salem. (Ant/Has)-d

Produksi

BPS juga mencatat produksi padi pada 2023 sebesar 53,98 juta ton gabah kering giling (GKG). Jumlah ini mengalami penurunan 1,40 persen atau sekitar 770.000 ton dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 54,75 juta ton GKG. "Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan luas panen sepanjang 2023 yang terdampak El Nino," kata Habibullah.

Habibullah menyebutkan, penurunan produksi ini diprediksi masih akan terjadi di periode Januari-April 2024. BPS mencatat potensi produksi pada Januari-April 2024 sebesar 18,59 juta ton GKG, sedangkan periode tahun sebelumnya

22,55 juta ton GKG.

Luas panen padi pada 2023 mencapai 10,21 juta hektare atau mengalami penurunan 0,24 juta hektare atau 2,29 persen dibanding 2022. Penurunan luas panen padi tersebut dipengaruhi oleh El Nino yang menguat pada Semester II-2023. "Kalau kita lihat potensi luas panen padi pada Januari-April 2024 seluas 3,52 juta hektare atau turun 0,69 juta hektare atau turun 16,48 persen dibanding periode yang sama tahun lalu," ucap Habibullah.

BPS memprediksi potensi luas panen pada Maret 2024 mencapai 1,16 juta hektare dan puncak panen terjadi pada

April 2024 dengan luas 1,59 juta hektare.

BPS juga mencatat, komoditas beras masih menjadi penyumbang inflasi bulanan (month-to-month/mtm) terbesar pada Februari 2024. "Komoditas penyumbang inflasi adalah beras dengan andil inflasi 0,21 persen," kata Habibullah.

Menurutnya, tren inflasi komoditas beras masih berlanjut hingga Februari, dengan inflasi mencapai 5,32 persen. Hampir seluruh provinsi mengalami inflasi beras, tepatnya 37 provinsi yang mencatatkan kenaikan harga beras. Sementara satu provinsi mengalami penurunan inflasi beras. (Ant/San)-d

Makan

Stunting bukan hanya soal kurang makan. Hal ini menjadi perlu garis bawah yang tebal. Rencana Prabowo dan Gibran sebagai calon presiden dengan menang versi *quick count* KPU dengan menyediakan makan siang disertai susu gratis bukanlah solusi komprehensif untuk mencegah stunting dan memperbaiki gizi buruk pada anak sekolah. Selain berpotensi tidak tepat sasaran, program ini bisa memicu masalah baru, bila jumlah nutrisi yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan. Masalah baru, berupa obesitas.

Stunting adalah suatu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kurang gizi terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) yang dimulai dari janin hingga anak berusia 2 tahun. Dampaknya adalah gangguan pada perkembangan otak, gangguan pertumbuhan fisik dan metabolisme anak. Dalam jangka panjang, anak yang stunting rentan mengalami penyakit degeneratif seperti hipertensi, penyakit jantung, diabetes melitus. Selain itu per-

kembangan otak tidak optimal, maka akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia (SDM).

Nah, program makan siang ini tidak menyentuh akar persoalan. Penanganan stunting seharusnya dilakukan pada anak usia kurang dari lima tahun. Perbaikan kualitas nutrisi itu harus dimulai dari awal kehidupan anak. Artinya program makan siang gratis ini terlambat untuk menangani prevalensi stunting karena hanya diberikan kepada anak usia sekolah.

Selain tidak menyentuh akar masalah program ini berpotensi membebani anggaran belanja negara. Dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program ini diperkirakan Rp 450 triliun per tahun. Jika merujuk pada postur APBN 2024 program makan siang dan susu gratis itu setara dengan 14% dari total anggaran negara tahun ini. Padahal, kita tidak boleh mengorbankan beberapa program sosial lainnya demi menyediakan makan siang dan susu gratis yang belum jelas implementasinya. Jika program ini tetap dipaksakan, masyara-

kat berpotensi kehilangan hak-hak dasarnya di sektor pendidikan dan kesehatan, yang ini juga menjadi hal prioritas bagi kelangsungan masyarakat. Ini tidak adil bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Tahun 2024 merupakan tahun yang penting. Tahun penuh pergolakan politik dan kepentingan. Meskipun demikian, Indonesia masih memiliki PR cukup serius. Permasalahan stunting harus menjadi prioritas dalam rangka persiapan SDM yang berkualitas, namun perlu kajian dan masukan oleh ahli-ahli baik praktisi maupun akademisi untuk mendapatkan kebijakan yang komprehensif dan tepat sasaran. Selanjutnya perlu diperhatikan sistem pendidikan untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia juga perlu langkah taktis untuk memberikan pendidikan kepada seluruh warga masyarakat tanpa kecuali. Karena pendidikan menjadi masa depan utama jangka panjang.

(Penulis Tenaga Ahli Percepatan Penurunan Stunting BKKBN DIY)-d

ATASI KRISIS PANGAN AKIBAT IKLIM Optimalkan Pangan Lokal, Termasuk Sukun

JAKARTA (KR) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebutkan, optimalisasi pangan lokal dapat mengatasi krisis pangan akibat perubahan iklim yang telah berdampak terhadap kegiatan-kegiatan pertanian di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia.

Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN Nawawi mengatakan, wilayah pesisir Pantai Utara (Pantura) di Pulau Jawa yang dulu terkenal sebagai lumbung padi kini mulai hancur dan hilang karena intrusi air laut yang timbul akibat penurunan tanah dan peningkatan muka air laut.

"Kita bisa beranjak dari pertanian beras ke pertanian pangan lokal, yang itu tentunya sangat potensial untuk dikembangkan," ujarnya di Jakarta, Jumat (1/3).

Nawawi menerangkan, pada era sebelumnya penduduk diseragamkan dengan kebijakan beras. Ketika penduduk kian ketergantungan terhadap beras, perubahan iklim mengancam lumbung-lumbung pangan memicu kelangkaan beras.

Sebagai negara tropis dengan matahari

bersinar sepanjang tahun dan zona cincin api yang subur, kata Nawawi, Indonesia memiliki berbagai pengetahuan lokal dalam mengolah sumber pangan yang adaptif terhadap berbagai kondisi lingkungan.

"Secara iklim, kondisi lahan, dan lainnya (pangan lokal) bisa dioptimalkan, sehingga kelangkaan pangan diharapkan nanti bisa ditutup oleh adanya pemanfaatan dari pangan lokal yang saat ini masih dipandang sebelah mata," kata Nawawi.

Disebutkan, pohon sukun yang tumbuh subur juga potensial menjadi sumber pangan alternatif pengganti beras. Riset BRIN tentang buah sukun di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, memiliki rata-rata kandungan karbohidrat 70,44 persen, protein 6,59 persen, lemak 1,29 persen, dan serat 6,55 persen.

Berdasarkan riset BRIN, Indonesia memiliki setidaknya 300 jenis pisang yang potensial untuk menjadi sumber pangan adaptif bagi penduduk. Pisang menjadi salah satu kekayaan biodiversitas Indonesia yang tersebar dari Pulau Sumatera hingga Papua. (Ant/San)-d

MK

metode kajian yang jelas dan komprehensif. Hal ini untuk meminimalisasi ketidakproporsionalan dalam konversi hasil pemilu.

"Dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif, sehingga dapat meminimaliskan disproporsionalitas yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak suara sah yang terbuang, sehingga sistem proporsional yang digunakan tapi hasil pemilu-nya tidak proporsional," tutur Enny.

Dijelaskan pula, pasal yang digugat oleh Perudem, yakni Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu perihal ambang batas parlemen tetap konstitusional untuk Pemilu 2024, tetapi konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya. "Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan threshold dengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut," ungkap Enny.

Sementara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud

Md memuji putusan MK tersebut. "Bagus, memang harus begitu, berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya," ujarnya di Gelora Bung Karno Jakarta, Jumat (1/3).

Menurut Mahfud, hal itu sudah sesuai dengan tradisi hukum di dunia di mana perubahan aturan yang menguntungkan atau merugikan seseorang harus diberlakukan pada periode berikutnya. Putusan soal penghapusan ambang batas parlemen tidak bisa diterapkan di Pemilu 2024. Sebab, ambang batas parlemen itu masih harus diputuskan oleh pembentuk undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR.

"Kan disebut juga berlaku sebelum 2029, tapi yang 2024 berlaku (ketentuan) lama. Jangan bermimpi lah, yang dapat satu persen, dua persen lalu bisa masuk sekarang," katanya. (Ant/Has)-d

Gunung

Pada periode pengamatan Kamis (29/2) pukul 18.00-24.00 WIB, Gunung Merapi juga tercatat satu kali meluncurkan guguran lava ke arah Kali Bebung dengan jarak luncur maksimum 1.000 meter. "Terdengar satu kali suara guguran dengan intensitas sedang dari Pos Babadan," ujar Agus.

Hingga saat ini BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada Level III atau Siaga. Potensi bahaya dari guguran lava dan awan panas guguran bisa berdampak ke

Kali Woro hingga sejauh 3 kilometer dari puncak dan Kali Gendol hingga sejauh 5 km dari puncak. Selain itu guguran lava dan awan panas guguran bisa berdampak ke Kali Boyong hingga sejauh 5 km dari puncak serta Kali Bedog, Krasak, dan Bebung hingga sejauh 7 km dari puncak. Jika terjadi erupsi eksplosif, lanjutnya, maka lontaran material vulkanik dari Gunung Merapi dapat menjangkau area dalam radius 3 km dari puncak gunung. (Ant/San)-d

Kapolri

Dalam pokok permohonannya disebutkan bahwa Termohon I (Kapolda Metro Jaya) dan Termohon II (Kapolri) telah melakukan penghentian penyidikan karena tidak melakukan penahanan terhadap Firlil Bahuri. "MAKI telah mendaftarkan gugatan prapradial atas belum ditahannya Firlil Bahuri oleh penyidik Krimsum Polda Metro Jaya padahal penetapan tersangkanya sudah berlangsung cukup lama, lebih dari tiga bulan," kata Ketua MAKI, Boyamin.

Selain Kapolda dan Kapolri, turut serta tergugat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, sebagai Termohon III. Menurut Boyamin, para termohon (I dan II) seharusnya melimpahkan berkas perkara yang ketiga kalinya kepada jaksa penuntut umum Kejati DKI Jakarta dan semestinya JPU segera menyatakan berkas lengkap (P-21) jika alat bukti telah cukup memenuhi unsur korupsi yang disangkakan penyidik.

Berlarutnya kasus Firlil Bahuri, kata Boyamin, terkendala karena Kapolda



Prakiraan Cuaca Sabtu, 2 Maret 2024					
Lokasi	Pagi	Cuaca	Suhu C.	Kelembaban	
Bantul			22-30	65-95	
Sieman			22-29	65-95	
Wates			22-29	65-95	
Wonosari			22-30	65-95	
Yogyakarta			22-30	65-95	

Dwi Pela Agustina, SIKom MA
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta

21 Februari merupakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN). Barangkali pembaca ada yang belum mengetahui peringatan ini karena memang kebanyakan kegiatan lazimnya digerakkan oleh pegiat lingkungan hidup atau

HPSN Jangan Sekedar Peringatan

instansi yang berkaitan, Dinas atau Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK). Banyak agenda dan kegiatan yang dilakukan untuk memperingati HPSN ini. Melalui laman resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peringatan HPSN ini dilangsungkan selama bulan Februari dan Maret yang disebut sebagai bulan peduli Sampah.

Masih pada siaran pers KLHK, launching program Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2024 merupakan usaha bersama untuk memperkuat posisi sektor pengelolaan sampah sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia, sebagai manifestasi prinsip

pengelolaan sampah berkelanjutan yang menggabungkan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Harapannya adalah agar dapat mengatasi polusi plastik dengan cara produktif.

Hal tersebut tentu merupakan program yang baik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Akan tetapi, apapun programnya, yang tak kalah penting adalah memastikan program tersebut sampai kepada lini terkecil masyarakat. Seperti menggaungkan HPSN ini di tiap daerah seperti di level kabupaten, kecamatan, kelurahan, dusun dan RT. Hal ini juga bisa dengan

mengaet komunitas-komunitas dan pengelola sampah di lingkungan tempat tinggal seperti Bank Sampah, Kelompok Sampah Mandiri dan sebagainya. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan penyuluhan ke daerah-daerah tentang pengelolaan sampah dan memberikan alat perangkat pengelolaan sampah sederhana bagi warga.

Di berbagai instansi dan wilayah, HPSN biasanya diperingati dengan aksi bersih-bersih lingkungan, seperti kali, got, pinggir pantai dan sebagainya. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh instansi pemerintah, namun kegiatan peringatan HPSN ini juga dijadikan kegiatan Corporate Social

Responsibility (CSR) bagi Perusahaan. Namun sekali lagi, peringatan HPSN jangan hanya dijadikan sekedar peringatan yang hanya periodik saja, melainkan bagaimana peringatan tersebut dapat diingat oleh masyarakat dan mengubah perilaku masyarakat supaya lebih sadar dalam mengelola sampah. Sementara yang menjadi sorotan KLHK kali ini adalah tentang penggunaan sampah plastik, tentu baiknya pemerintah juga diharapkan memiliki kebijakan secara nasional tentang penggunaan plastik. Hal ini karena penggunaan kantong belanja di tiap supermarket belum berlaku di setiap wilayah di Indonesia.

Selain itu, perilaku masyarakat yang masih membakar sampah belum menjadi perhatian pemerintah secara tegas, padahal undang-undang larangan pembakaran sampah tertuang pada UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Aturan ini terdapat pada Pasal 29 Ayat 1 yang menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Hal ini menegaskan bahwa setiap orang berkewajiban mengelola sampah rumah tangga yang berwawasan lingkungan sehingga tidak ada lagi warga yang membakar sampahnya karena dapat menyebabkan polusi dan pencemaran



lingkungan. Meskipun undang-undang ini dikembalikan sepenuhnya kepada masing-masing daerah, akan tetapi, tentu harapannya pemerintah daerah dapat membuat kebijakan tegas dan memberikan penyuluhan tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat termasuk larangan membakar sampah dan membatasi penggunaan kantong plastik. Sehingga dengan demikian, peringatan HPSN ke depannya tidak hanya sekedar peringatan namun momentum bagi warga untuk lebih baik lagi dalam mengelola sampah. ***